

BAB III

PEMBAHASAN

1. Mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap

Dalam perspektif proses implementasi proram memang banyak beberapa kendala ataupun kesukaran-kesukaran yang sering dijumpai oleh para implementator. Dengan hal ini ada sejumlah permasalahan baik sosial atau yang lainnya. Terkadang persoalan yang timbul dalam implementasi program itu sangat bervariasi diantara lain adalah mudah dan sulitnya masalah yang hendak akan dipecahkan. Dengan banyaknya persoalan yang di timbulkan harapanya adalah menjadi tantangan dan inovasi Pemerintah dalam menghasilkan solusi.

a. Kesukaran-kesukaran dalam teknis

Dalam kondisi pelaksanaan program tentunya terdapat kesukaran-kesukaran di dalam persyaratan teknis. Maka dari itu kemampuan untuk mengembangkan indikator-indikator dalam prestasi kinerja haruslah berdasarkan pada prinsip-prinsip yang sangat mempengaruhi dengan proses implementasi program tersebut. Sementara dalam proses implementasi kebijakan ini merupakan perpaduan antara berbagai elemen yang tergabung dalam proses implementasi program. Dengan adanya kerja sama ataupun tindakan yang bersinergi yang dapat dilakukan ini merupakan suatu bentuk dukungan yang paling utama dalam melaksanakan program-program tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Widi dan beliau merupakan sebagai aparat pelaksana pada Dinas Pertanian dan Pangan di Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut :

“Kalau menurut saya dari segi teknis mungkin terkait dengan proses pembudidayaan dan peremajaan kakao lagi. Adanya program bantuan dan bibit, pupuk dan peralatan di dalam pelaksanaannya. Pada tahun 2018 Pemerintah juga memberikan alat teknis pengolahan. Terkhusus di Desa Banjaroya untuk pembibitan kakao ini masih tergolong B dan C” .(Hasil Wawancara Ibu Widi, 2018).

Dari kutipan yang ada diatas yang telah dipaparkan oleh informan memang menjadi perhatian Pemerintah di dalam proses impementasi program kebijakan Pemerintah. Dalam kondisi teknis yang terjadi pada pengembangan produk unggulan kakao ini sudah sepenuhnya masyarakat membantu di dalam pelaksanaannya. Dengan begitu pada tahun 2018 terutama untuk Dinas Pertanian dan Pangan sudah membantu alat teknis pengolahan bubuk kakao. Sehingga dengan adanya alat pengolahan bubuk kakao, harapanya masyarakat setempat bisa mengembangkan dan membudidayakan kakao pada taraf yang lebih luas.

Ketika pada saat observasi ternyata peralatan yang digunakan didalam pembuatan pembuatan bubuk belum beroperasi secara total, hanya saja terdapat kendala terutama di dukuh Banjaran peralatan yang digunakan tidak beroperasi. Sehubungan dengan penjelasan dan analisis yang ada di atas meliputi kesukaran-kesukaran dalam teknis baik Pemerintah atau masyarakat adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Faktor-Faktor Kesukaran-Kesukaran dalam Teknis
Produk Unggulan Kakao

No	Stakeholders	Permasalahan	Solusi
1.	Pemerintah	Pemerintah masih proses dalam pengolahan bubuk dan belum bisa dalam pemasaran yang bernilai ekonomis tinggi	Diperlukan kerja sama yang baik antara Pemerintah dan masyarakat guna untuk menumbuhkan dan mengembangkan

		<p>Pemerintah belum mencapai terhadap prinsip-prinsip <i>One Village One Product</i></p> <p>Terkait dengan benih yang digunakan masih tergolong rendah yaitu B dan C</p>	<p>produk unggulan kakao supaya bernilai ekonomis tinggi</p> <p>Solusi yang dapat ditawarkan adalah dengan adanya monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan program</p> <p>Dalam pembibitan Pemerintah harus mengubah atau mengganti dengan bibit yang lebih unggul, guna hasil produksi agar meningkat</p>
2.	Masyarakat	<p>Kurangnya kontrol disebagian Dukuh terhadap pengembangan produk unggulan kakao terutama pada sektor peralatan</p> <p>Terkadang apa yang dibutuhkan masyarakat berbeda dengan pemberian dari Pemerintah</p> <p>Dalam pengembangan produk unggulan kakao terkait dengan pengetahuan dan wawasan masyarakat tersebut masih kurang</p>	<p>Mengontrol alat pengolahan produk unggulan merupakan peranan Pemerintah guna memacu produk agar bisa mencapai tujuan yang tepat Pemerintah harus memposisikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat secara sebenarnya</p> <p>Solusi dengan adanya kekurangan pengetahuan dan wawasan di masyarakat perlu adanya sosialisasi ataupun bintek tentang pengembangan produk unggulan</p>

Sumber : Data Primer, 2018

Pada dasarnya jika melihat dari tabel yang ada diatas, dari segi kekurangan dan kelebihan untuk setiap *stakeholders* yaitu Pemerintah dan masyarakat memang terdapat kendala baik Pemerintah dan Masyarakat sendiri. Oleh sebab itu, dengan adanya kekurangan di setiap *stakeholders* ini merupakan hal yang biasa yang dialami disetiap proses implementasi kebijakan program *One Viilage One Product* ini. Oleh karena itu, perlu adanya pembaruan monitoring bahkan evaluasi pada setiap kebijakan program tersebut.

b. Keberagaman perilaku yang diatur

Bentuk dari keberagaman perilaku yang diatur memang menjadi perhatian dari Pemerintah dan elemen yang lainnya. Jika melihat bentuk dari keberagaman perilaku yang ada, baik dalam bentuk positif maupun negatif itu sangat lumrah yang terjadi dalam pelaksanaan program. Proses dalam pelaksanaan program memang adanya tindakan-tindakan yang sentimental baik dalam aparatur Pemerintah sendiri atau pada masyarakat. Dengan hal ini ketika banyaknya persoalan yang terjadi akan berbanding lurus dengan proses pelaksanaan yang ada. Karena itu sangat ada keseimbangan antara kedua belah pihak tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Ibu widi sebagai aparat pelaksana yang bekerja pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut :

“Saya lihat sudah terlihat karena sudah beberapa tahun belakang ini yaitu sekitar 3 tahun mengalami perubahan dari segi implementasi programnya. Masyarakat setempat juga adanya kelompok pertanian dan disetiap kelompok pertanian membentuk hari kakao masing-masing. Pemerintah hanya memfasilitasi dan Pemerintah juga membentuk gerakan kebun pada Desa Banjaroya guna untuk saling tolong menolong dan menciptakan keadaan sosial masyarakat”.(Hasil wawancara Widi, 2018).

Efektivitas Pemerintah daerah terutama terkait Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo selaku penyelenggaraan Pemerintah terhadap produk unggulan kakao. Dengan adanya kebijakan tentang *One Village One Product* ini harapannya peran Pemerintah mengubah pola perilaku yang terjadi pada masyarakat sendiri. Pada kenyataannya terjadi masyarakat di Desa Banjaroya masyarakat masih adanya ketergantungan dengan badan atau instansi dan elemen lainnya di dalam pengembangan produk unggulan kakao. Sedangkan pada saat dahulu belum ada terciptanya kelompok pertanian, dengan adanya peran Pemerintah akhirnya ada dan itu semuanya akan mempermudah pada masyarakat sendiri. Selain itu juga, cakupan dalam implementasi program ini Pemerintah sudah merubah beberapa kendala-kendala pada masyarakat yaitu Pemerintah juga membentuk gerakan hari kebun kakao di setiap kelompok pertanian.

Pada dasarnya untuk Desa Banjaroya, Kecamatan Kalibawang ini memiliki beberapa kelompok pertanian. Dengan hal ini, kelompok pertanian menjadikan alternatif masyarakat untuk mempermudah dalam mengembangkan produk unggulan kakao. Di Desa Banjaroya mempunyai empat kelompok pertanian diantara lain yaitu pedukuhan patok wetan, patok kulon, slanden dan banjaran. Untuk keberagaman perilaku yang dapat diatur dalam masyarakat tersebut sebenarnya terdapat persoalan terutama pada aspek pola pikir dan tingkat pengetahuan maupun wawasan di dalam pengembangan produk unggulan kakao. Semestinya dengan adanya persoalan tersebut, menjadi bahan solusi dari Pemerintah. Sebenarnya di dalam masyarakat Desa Banjaroya sendiri, merupakan masyarakat sangat kompak dan sinergi. Karena sebagaimana mestinya produk

unggulan kakao ini perlu dikembangkan dan bernilai jual tinggi. Seperti kita ketahui bahwasanya di Desa Banjaroya sangat menerima ataupun setuju dengan kebijakan tersebut. Bahwasanya di Desa Banjaroya memiliki banyak tanaman kakao yang tersebar disetiap pedukuhan. Tanaman kakao sudah lama ada keberadaanya di Desa tersebut. Pada kenyataanya masyarakat di Desa Banjaroya tersebut sudah sangat kenal ataupun mengerti dengan tanaman kakao dan masyarakat juga sudah membudaya dalam menanam kakao. Oleh sebab itu, kakao ini sebagai bentuk pilihan yang tepat ataupun orientasi masyarakat yang ada didaerah. Budaya ataupun kegiatan kakao ini juga sudah melekat ataupun menyatu. Oleh sebab itu, masyarakat yang ada disana masih masih menerapkan budaya saling tolong dan menolong. Sementara dengan hal ini, dalam masyarakat untuk menjual produk unggulan kakao masih pada taraf pada pasca panen dijual.

Sementara dengan adanya gerakan kebijakan program *One Village One Product* ini masyarakat tersebut masih menerapkan budaya-budaya keaslian di daerah tersebut. Dengan adanya kebijakan program dari Pemerintah tersebut masyarakat tersebut sudah terbiasa bahkan menyesuaikan dengan keadaanya. Justru yang terjadi pada masyarakat perubahan pola pikir atau perubahan perilaku ternyata lebih memperkuat dengan adanya kebijakan program *One Village One Product* tersebut. Maka dari itu pentingnya komunitas ataupun kelompok pertanian ini dapat menumbuhkan kesadaran yang tinggi dan perubahan perilaku yang dapat dikendaki. Maka dari itu dengan adanya kebijakan program *One Village One Product* ini, yang semula menganggap kakao biasa saja, tetapi disini yang terjadi justru Pemerintah mulai menghargai produk unggulan kakao di Desa

Banjaroya tersebut. Selanjutnya dengan perubahan-perubahan tersebut, makanya timbul inovasi-inovasi baru seperti adanya fermentasi kakao, pengolahan kakao menjadi bubuk kakao, pengolahan kakao menjadi kopi dan lain sebagainya. Dalam konteks ini, terutama untuk daerah tersebut akan dijadikan sebagai kampung kakao. Hal ini merupakan inisiasi Pemerintah untuk memajukan ataupun mengembangkan daerah tersebut. Pada dasarnya dengan adanya kampung kakao ini dapat menjadikan destinasi wisata perkebunan.

c. Persentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran

Berdasarkan pada totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran secara umum bisa dikatakan sebagai bentuk bahwa semakin kecil dan semakin jelas dalam perilaku yang hendak diubah, maka akan berbanding lurus dengan bagaimana cara memobilisasi dukungan politik terhadap program tersebut, Dengan demikian akan mempermudah dalam melihat peluang bagi pencapaian dari tujuan kebijakan yang sudah direncanakan. Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Widi dan beliau sebagai aparat pelaksana yang bekerja pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut

“Kalau di Desa Banjaroya ini tidak ada kelompok khusus kakao sendiri, tetapi kelompok pertanian ini diciptakan untuk membawahi semua produk unggulan yang ada di Desa tersebut”. (Hasil Wawancara Ibu Widi, 2018).

Pada tahap pelaksanaan kebijakan program Pemerintah, dalam penyelenggaraan proses persentase penduduk yang tergabung dalam kelompok sasaran yang telah di paparkan oleh informan yang ada diatas bahwasanya adalah terkhusus untuk Desa Banjaroya sendiri dibentuknya kelompok pertanian adalah untuk sebagai wadah komunikasi antar petani. Untuk Desa Banjaroya sendiri

dibentuknya kelompok pertanian masih bersifat umum, artinya belum bisa membentuk kelompok pertanian terkhusus. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan Bapak Tarmuji. Beliau adalah sebagai Ketua kelompok pertanian dukuh Banjaran adalah sebagai berikut :

“Menurut saya kalau masyarakat yang tergabung dalam kelompok sasaran di Desa Banjaroya Belum semuanya, karena memang kebutuhan keseharian masyarakat dan berbeda-beda kepentingan”. (Hasil Wawancara Bapak Tarmuji, 2018)

Sebelumnya, informan ini menyatakan bahwa pada Desa Banjaroya pada kelompok pertanian tidak adanya kelompok khusus dalam mengembangkan produk unggulan, tapi masih bersifat umum dalam pelaksanaannya. Tapi ketika yang dipaparkan dari ketua kelompok pertanian pada dukuh Banjaran bahwa masyarakat secara seluruhnya belum tergabung dalam kelompok sasaran, karena memang semuanya tergantung pada kebutuhan keseharian masyarakatnya. Dengan hal ini terjadi perbedaan pandangan antara Pemerintah daerah dengan Ketua kelompok pertanian Dukuh Banjaran. Hal ini diperkuat oleh Bapak Saryono. Beliau sebagai Ketua Kelompok petani Dukuh Patok Wetan dalam pernyataan sebagai berikut :

“Dari empat kelompok pertanian yang ada di Desa Banjaroya memang sudah bergabung menjadi satu pintu. Guna untuk mengembangkan hasil produksi kakao. Pemerintah, bptp, dan elemen yang lainnya adanya pendampingan pada setiap bulannya”. (Hasil Wawancara Bapak Tarmuji, 2018)

Sebelumnya, informan sudah menyatakan semuanya dari segi kelompok sasarannya. Tapi dalam pernyataan yang dikemukakan dari Ketua kelompok pertanian Dukuh patok wetan bahwasanya terbentuk empat kelompok pertanian di

Desa Banjaroya memanag sudah bergabung menjadi satu pintu. Jadi memang yang terjadi pada setiap dukuh terhadap pengembangan produk unggulan mengalami permasalahan yang beda, tapi pada hakekatnya bertujuan untuk mengembangkan produk unggulan kakao tersebut. Disini ada hal yang perlu digaris bawahi, ternyata setiap dukuh di Desa Banjaroya harus bisa mempengaruhi kebijakan dari Pemerintah daerah. Sementara dengan adanya pemaparan tentang persentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran, disamping itu juga terutama di Desa Banjaroya memiliki beberapa kelompok petani diantara lain adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Klasifikasi Nama Pedukuhan dan Nama Kelompok Tani

No	Nama Pedukuhan	Nama Kelompok Tani
1.	Patok wetan	Ngudi lestari
2.	Slanden	Ngudi rejeki
3.	Banjaran	Ngudi mulyo
4.	Patok kulon	Rukun abadi

Sumber : Data Primer, 2018

Pada dasarnya untuk kelompok sasaran yang menjadi proses pelaksanaan pengembangan produk unggulan kakao atau bisa dikatakan di tingkat desa merupakan kelompok tani di Desa Banjaroya. Meskipun demikian di Desa Banjaroya ini terbagi atas empat pedukuhan dan empat kelompok tani. Dengan adanya kelompok tani di desa diciptakan untuk membangun kepentingan bersama dalam kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumber daya. Di samping itu, dibentuknya kelompok petani di Desa Banjaroya ini bertujuan sebagai wadah

komunikasi antar petani. Untuk itu kelompok petani tersebut, perlu diberdayakan dan selalu menjadi peran utama untuk pengembangan produk unggulan kakao. Pada dasarnya perubahan perilaku yang dapat diatur oleh Pemerintah untuk di Desa Banjaroya akan berdampak pada persentase totalis penduduk, mungkin bisa dikatakan sebagai hasil produksi kakao. Karena sebagaimana mestinya hasil produksi kakao ini yang menjadi tolak ukur perubahan-perubahan yang ada di masyarakat. Sebenarnya dalam pengembangan produk unggulan kakao di Desa Banjaroya ini bisa dikatakan sudah dapat menghasilkan produksi kakao sekitar 600 kuintal per kelompok pertanian selama sebulan. Sementara kenaikan hasil produksinya sekitar 100 kuintal perbulannya, dengan hal ini juga dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Dengan hal ini perubahan yang dapat dialami masyarakat tersebut mengalami signifikan. Harapannya adalah ketika hasil produksi tinggi masyarakat tersebut dapat mengolah produk unggulan kakao pasca panen dengan suatu olahan yang lebih bernilai jual tinggi.

d. Tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki

Persoalan tentang tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki dalam mencapai tujuan formal merupakan fungsi dari jumlah kelompok sasaran dan bagaimana jumlah perubahan yang dituntut. Dalam hal yang lainnya perubahan perilaku sangat menentukan keberhasilan proses implementasi program, karena dengan jumlah perilaku yang dikehendaki, semakin sulit memperoleh implementasi yang berhasil. Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Widi. Beliau adalah sebagai aparat pelaksana yang bekerja pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut :

“Kalau untuk mengukur secara kuantitas memang tidak bisa mas, mungkin bisa diukur secara kualitas pengembangan produk unggulan kakao memang sudah banyak mengeluarkan dana baik dalam pembudidayaan atau yang lain sebagainya”. (Hasil Wawancara Ibu Widi, 2018)

Kutipan yang ada diatas yang sudah dipaparkan oleh Ketua bidang perkebunan bahwasanya peranan Pemerintah dalam mengembangkan produk unggulan kakao sudah meliputi beberapa hal yang terkait. Hanya saja yang perlu dilakukan adalah pada tingkat pengolahan dan proses produksinya. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Tarmuji. Beliau merupakan sebagai Ketua kelompok pertanian Dukuh Banjaran adalah sebagai berikut :

“Sebenarnya Pemerintah sudah memberikan alat untuk produksi, tapi peran Pemerintah kurang mengontrol alat tersebut maka dari itu akhirnya alat tersebut kurang bermanfaat dalam pelaksanaannya”. (Hasil Wawancara Bapak Tarmuji, 2018)

Dalam hal ini, sebenarnya sudah adanya keselarasan dari segi ruang lingkup perubahan antara Pemerintah dan masyarakat. Itu artinya sudah terjalin keharmonisan, tapi ternyata yang sudah dipaparkan ketua kelompok pertanian dari Dukuh Banjaran Pemerintah belum bisa mengontrol peralatan-peralatan produksi pengembangan produk unggulan kakao. Akhirnya yang terjadi peralatan yang diberikan Pemerintah kurang bermanfaat dalam pelaksanaannya tehusus untuk Dukuh Banjaran. Dalam proses pelaksanaan pengolahan produk ternyata, alat yang digunakan kurang efektif, dikarenakan alat tersebut belum bisa mencapai target apa yang diharapkan oleh masyarakat dukuh tersebut.

Untuk penerapan variabel pertama yaitu mudak atau tidaknya masalah yang akan digarap meliputi beberapa indikator adalah kesukaran-kesukaran dalam teknis ini memang Pemerintah sudah membantu di dalam pelaksanaannya program-program tersebut, sedangkan untuk keberagaman perilaku yang diatur ini adalah memang perlu dikembangkan dan selalu diberi pengetahuan dan wawasan pada masyarakat disebabkan karena pada masyarakat di Desa Banjaroya mempunyai pengetahuan dan wawasan yang berbeda, maka dari itu solusi yang dapat ditawarkan adalah dengan cara Pemerintah dan elemen yang lainnya adalah dengan mengadakan bimbingan, pelatihan dan workshop.

Persentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran di Desa Banjaroya, Kecamatan Kalibawang ini adalah sebenarnya bisa dikatakan sudah cukup baik hanya saja ada sedikit permasalahan yaitu sebagian besar masyarakat belum gabung dalam kelompok sasaran tersebut. Untuk tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki sebenarnya Pemerintah sudah mengupayakan tingkat perubahan secara kualitas untuk pengembangan produk unggulan kakao.

2. Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi

Perubahan kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi pada prinsipnya adalah untuk menjabarkan tujuan-tujuan formal yang akan dicapai. Dengan adanya lembaga-lembaga yang berpotensi dalam melaksanakan proses program tersebut dan pastinya adanya dukungan sumber-sumber finansial dalam lembaga. Peranan dalam membuat kebijakan bisa saja memainkan perannya yang

cukup berarti untuk mencapai tujuan kebijakan dengan cara mendayagunakan wewenang yang mereka miliki untuk menstruktur proses implementasi.

a. Kecermatan dan penjelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi akan dicapai

Adapun tujuan-tujuan resmi yang hendak dicapai seharusnya memang disusun secara jelas dengan kepentingan dalam masyarakat. Para pejabat pelaksana program memang sebagai unsur-unsur pencapaian tujuan resmi yang hendak akan dicapai. Dengan adanya tujuan yang jelas maka dapat pula berperan pada sumber atau aktor yang terlibat, baik yang didalam lembaga atau yang diluar lembaga. Sebagaimana mestinya jika dalam suatu peraturan memberikan petunjuk, maka dapat pula pengeluaran yang dihasilkan sejalan dengan yang direncanakan. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Kamdianto, sebagai aparat pelaksana yang bekerja pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut :

“Kalau tujuan dari pemerintah sendiri dalam pengembangan produk unggulan kakao meningkatkan produksi kakao, meningkatkan mutu dari kakao, tapai juga provitas nya lebih dan pastinya pengolahan kakao juga lebih baik. Nantinya kalau semua nya sudah baik akan meningkatkan perekonomian di desa, menyerap tenaga kerja dan masyarakat akan sejahtera dan itu semua merupakan harapan instansi dan lembaga”. (Hasil Wawancara Bapak Kamdianto, 2018).

Tujuan dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo merupakan hal yang terbaik buat masyarakat yang sudah dipaparkan diatas. Tetapi di dalam pelaksanaanya untuk pengembangan produk unggulan sendiri belum bisa pada tahap distribusi apalagi konsumsi. Seperti yang kita ketahui pada tahap pelaksanaanya implementasi program masih dalam proses yang kurang memadai.

Terutama faktor yang menjadi penghambat dalam proses pelaksanaan kebijakan program tersebut terletak pada teknis seperti peralatan. Terkadang pada pembaharuan peralatan juga sangat kurang ideal apa yang dibutuhkan masyarakat. Sehubungan dengan hal ini, Pemerintah sudah memberikan alat ketika alat digunakan yang terjadi alat tersebut digunakan kurang maksimal bahkan menghambat didalam proses pengolahan. Pada proses pengolahan terdapat kendala-kendala ini, mengakibatkan hasil yang didapatkan kurang sesuai dengan target yang ada. Perlu dilakukan pembenahan dalam alat tersebut.

b. Keterandalan teori kausalitas yang diperlukan

Dalam hubungan dengan pembaharuan teori kausal terkadang memiliki sifat secara implisit dalam pencapaiannya. Hal yang sangat perlu dilakukan adalah bagaimana caranya kontribusi yang dapat dilakukan itu semestinya mampu mencapai perubahan-perubahan yang dapat dikehendaki. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Kamdianto, sebagai aparat pelaksana yang bekerja pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut :

“Pemerintah juga komitmen mendukung dengan adanya renstra dengan mulai memback up kakao, dan pengembangan kawasan kampung kakao di kalibawang dan pastinya Pemerintah mencanangkan seperti pembedahan bukit menoreh. Nah nantinya akan dijadikan sebagai area perdagangan di pinggir jalan”. (Hasil Wawancara Bapak Kamdianto, 2018).

Dalam keadaan kondisi geografis yang mendukung bahwa Pemerintah akan mencanangkan beberapa pembaharuan demi kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya pengembangan kawasan kampung kakao di Desa Banjaroya ini merupakan komitmen Pemerintah yang bagus dan kedepannya dengan adanya kawasan kampung kakao akan menarik simpatisan para wisatawan. Bukti nyata

Pemerintah sangat menjawab dengan kondisi daerah tersebut, dengan berkomitmen mendukung berjalannya aktivitas pengembangan kakao.

c. Ketetapan alokasi sumber dana

Penggunaan dana adalah hal yang sangat penting. Karena memang fungsi dari sumber dana itu sendiri sebagai pendukung terjadinya implementasinya program. Secara umum tersedianya dana sangat diperlukan agar terbuka peluang untuk mencapai tujuan-tujuan formal yang hendak dicapai. Terkadang sumber dana itu sangat mempengaruhi dengan proses implementasi kebijakan program. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Kamdianto, beliau sebagai pelaksana yang bekerja pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut :

“Kalau untuk masalah dana dalam pengembangan APBN 1 yang paling besar dan ada juga mungkin yang terkait dengan bantuan-bantuan yang lainnya terkait dengan pengembangan produk unggulan”. (Hasil Wawancara Bapak Kamdianto, 2018).

Seperti yang diungkapkan beliau, untuk alokasi dana dalam pengembangan produk unggulan tidak disebutkan berapa rupiahnya. Beliau hanya menyebutkan sumber dana nya dan beliau memaparkan sumber dana yang terbesar adalah dari APBN 1. Namun dalam pelaksanaan sumber dana untuk pengembangan produk unggulan bukan dari instansi Pemerintah yang terkait, melainkan dari elemen yang lainnya. Didalam melaksanakan pengembangan produk unggulan tersebut, disetiap lembaga-lembaga sinergi dalam memberikan bantuan. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Tarmuji. Beliau adalah sebagai Ketua Kelompok pertanian Dukuh Banjaran adalah sebagai berikut :

“Kalau untuk masalah dana seberapa persisnya saya tidak tahu berapa jumlahnya, tapi yang jelas Pemerintah sudah membantu dalam segi material seperti integrasi kambing-kakao, adanya pembangunan home industri”. (Hasil Wawancara Bapak Tarmuji, 2018).

Tentu saja Pemerintah daerah selalu membantu masyarakat dalam mengembangkan produk unggulan tapi bukan dalam bentuk tunai. Tapi Pemerintah membantu dari segi material. Dengan begitu ketika Pemerintah membantu berupa material harapannya adalah mengurangi tingkat korupsi. Seperti yang dikemukakan oleh informan. Beliau adalah sebagai Ketua Kelompok pertanian Dukuh patok wetan adalah sebagai berikut:

“kalau jumlahnya kelompok-kelompok pertanian tidak tahu dalam rupiahnya, kalau disini tahunya sudah dibentuk menjadi barang seperti mesin, kotak fermentasi, timbang elektronik, alat termometer dan lain sebagainya”. (Hasil Wawancara Bapak Saryono, 2018).

Sama halnya yang telah dipaparkan pada Ketua kelompok pertanian dukuh Banjaran terkait dengan sumber dana dan dan jumlah dana yang terkait untuk pengembangan produk unggulan. Dalam pelaksanaannya Pemerintah memberikan bantuan berupa alat-alat teknis dalam pengolahan produk unggulan kakao. Disini peran Pemerintah dalam memberikan bantuan berupa fasilitas-fasilitas yang mendukung sebenarnya cara yang tepat demi menciptakan keberlangsungan proses dalam pengembangan produk unggulan kakao.

d. Keterpaduan hirararki di dalam lingkungan dan diantara lembaga atau instansi pelaksana

Dalam kaitannya proses implementasi program diperlukan adanya keselarasan, hanya saja masih terdapat beberpa kesukaran-kesukaran untuk mewujudkan koordinasi antara badan atau instansi yang lainnya. Dalam

koordinasi dalam menjalankan implementasi program masih ada sangkutnya dengan Pemerintah pusat, sedangkan dalam pelaksanaannya seringkali tergantung pada Pemerintah daerah. Seperti yang disampaikan Bapak Kamdianto :

“Kalau menurut saya selama ini sudah ada kerja sama dalam segala elemen misalnya dari uptd, koperasi, bptp, diskoperindag, dan lingkup akademis seperti UGM dan lembaga swadaya masyarakat dan lain sebagainya. Nah selama ini mas dari beberapa elemen sangat sinergi dalam mengembangkan produk unggulan tersebut”. (Hasil Wawancara Bapak Kamdianto, 2018).

Pada dasarnya yang terjadi dalam pelaksanaan implementasi program Pemerintah dalam lingkup lembaga yang lainnya sudah bekerja sama dalam membentuk sinergi yang kuat. Kaitanya dalam hal ini bisa dilihat dari hasil yang dicapainya dalam pelaksanaannya programnya. Pada pelaksanaan program tersebut terdapat bantuan-bantuan dari beberapa elemen misalnya dari pihak akademis UGM, bptp dan lain sebagainya.

e. Aturan-aturan pembuatan keputusan dari badan pelaksana

Selain dari aturan-aturan terhadap tujuan yang akan dicapai, baik dalam bentuk hambatan ataupun untuk memenuhi kebutuhan kelompok sasaran. Tapi disisi lain dasar hukum atau undang-undang juga dapat mempengaruhi proses implementasi dengan cara menggaris secara formal aturan-aturan tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Kamdianto sebagai aparat pelaksana yang bekerja pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:

“Kalau menurut saya mas Pemerintah itu membantu dari tingkat bawah dan pemerintah menyerap aspirasi rakyat dari bawah langsung. Dan Pemerintah sendiri tidak berani bertindak langsung tanpa melihat potensi yang ada di masyarakat sendiri, nanti kalau Pemerintah tidak sesuai

kehendak masyarakat yang terjadi bakal kurang bermanfaat”. (Hasil Wawancara Bapak Kamdianto, 2018).

Faktor terpenting dalam penerapan dalam suatu kebijakan khususnya mengenai pendekatan program *One Village One Product* adalah untuk memenuhi aturan-aturan yang ditelaah direncanakan. Dalam konteks ini, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon untuk selalu membantu keluhan ataupun permasalahan dari masyarakat langsung dan semestinya sesuai dengan dengan berdasarkan aturan-aturan yang sudah direncanakan.

f. Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termasuk dalam undang-undang

Pada prinsipnya para pejabat pelaksana dalam mengimplementasikan program tidak terlepas dengan acuan pada aturan atau undang-undang yang telah ditetapkannya. Dengan demikian dengan adanya aturannya yang sudah ditetapkan, para pejabat pelaksana dapat mencapai tujuan bersama. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Kamdianto. Beliau aparat pelaksana yang bekerja pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut :

“Untuk pengembangan produk unggulan sudah ditetapkan dan Pemerintah sendiri sudah melaksanakan dari tujuan-tujuan resmi yang ditetapkan”. (Hasil Wawancara Bapak Kamdianto, 2018).

Kutipan yang ada diatas menjelaskan bahwasanya Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo dalam menjalankan program semestinya mengacu pada kebijakan Pemerintah yang sudah dibuat. Jika memang Pemerintah dalam menjalankan program tidak sesuai dengan aturan yang direncanakan, akibatnya adalah tidak adanya kesesuaian antara rencana dan implementasinya.

g. Akses formal pihak-pihak luar

Meskipun dengan adanya pihak-pihak yang memfokuskan pada tingkat implementasi program seperti hal yang badan atau instansi pelaksana kebijakan. Namun dengan demikian, ada pihak-pihak yang diluar yang bersedia berpartisipasi dalam untuk mendukung program yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan. Pada pasalnya didalam tahap implementasi program atau kebijakan adanya keterkaitan antara dari pihak dalam ataupun luar dalam mewujudkan tercapainya implementasi program tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Kamdianto. Beliau aparat pelaksana yang bekerja pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut :

“Kita ada kerja sama dengan tomira dan setiap produk-produk unggulan yang ada bisa menjualnya disitu dan setiap produk-produk unggulan yang lainnya selalu menitipkan produk unggulannya ke tomira”. (Hasil Wawancara Bapak Kamdianto, 2018).

Dalam hal ini, Pemerintah daerah terkhusus Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo sudah menjalin kerja sama dengan tomira guna untuk menjual produk-prodduk di tomira tersebut. Menjaln kerja sama yang baik dengan toko jejaring sebenarnya adalah untuk meningkatkan dan mempermudah masyarakat didalam menjual hasil produksi warga setempat. Sangatlah penting dalam menunjang perekonomian masyarakat. Seperti hal yang diperkuat dari Ketua Kelompok pertanian Dukuh Banjaran yaitu Bapak Tarmuji adalah sebagai berikut :

“Antara Pemerintah dan masyarakat selaras dalam bekerja sama, dengan koperasi harapannya adalah untuk menjual produk lokal”. (Hasil Wawancara Bapak Tarmuji, 2018).

Berdasarkan yang sudah dipaparkan beliau yang ada diatas dapat kita tarik suatu kesimpulannya adalah dalam tingkat Desa terkhusus Desa Banjaroya melakukan kerja sama dengan Koperasi di Desa. Dengan adanya hal ini, harapannya adanya hubungan komunikasi yang baik antara pihak koperasi dan Kelompok pertanian dalam mengembangkan produk unggulan. Hal serupa juga diungkapkan oleh informan Ketua Kelompok pertanian Dukuh patok wetan yaitu Bapak saryono adalah sebagai berikut :

“Kalau Pemerintah sepenuhnya sudah membantu yang dibutuhkan masyarakat seperti alat-alat yang berhubungan dengan pengembangan produk unggulan. Selanjutnya kalau yang lainnya seperti UGM juga membantu teknis peralatan buat pengembangan produk unggulan, dan adanya bintek”. (Hasil Wawancara Bapak saryono, 2018).

Dalam pernyataan yang disampaikan dari Ketua kelompok pertanian Dukuh patok wetan yang ada diatas bahwasanya seperti lingkup akademis terkhusus UGM sudah membantu dalam pengembangan teknis, dan lingkup akademis juga mengadakan sosialisasi pengembangan dan pengolahan produk unggulan.

Dari variabel yang kedua yaitu kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi meliputi beberapa indikator adalah kecermatan dan penjelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi akan dicapai ini merupakan peran yang dapat diwujudkan dari Pemerintah dan beberapa elemen yang lainnya demi untuk mengembangkan produk unggulan kakao dan menciptakan kerja bagi masyarakat. Keterandalan teori kausalitas yang diperlukan dalam indikator kedua ini adalah peranan Pemerintah sangat memperhatikan pada aspek pengembangan kampung kakao di daerah tersebut.

Ketetapan alokasi sumber dana dalam mengembangkan produk unggulan kakao anggaran bersumber dari APBN dan APBD yang dapat dijadikan sebagai dasar pengembangan produk unggulan tersebut. Keterpaduan hirararki di dalam lingkungan dan diantara lembaga atau instansi pelaksana memang sudah bersinergi dalam mengembangkan dan memperdayakan produk unggulan kakao. Aturan-aturan pembuatan keputusan dari badan pelaksana ini pastinya sangat aspiratif dalam penyerapan permasalahan dari masyarakat di Desa Banjaroya.

Selanjutnya kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termasuk dalam undang-undang memang mengacu pada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang mengenai hal tersebut. Kemudian untuk akses formal pihak-pihak luar di dalam pengembangan produk unggulan kakao seperti kerja sama dengan tomira, dengan berlangsungnya hal ini semestinya ada dampak yang positif bagi masyarakat dan dari pihak tomira tersebut.

3. Variabel-Variabel Diluar Undang-Undang Yang Mempengaruhi Implementasi

Hal yang sesungguhnya adanya proses implementasi kebijakan dalam suatu program yang dapat mempengaruhi implementasi diluar undang-undang adalah kondisi sosial, ekonomi dan teknologi, selain itu juga adanya dukungan publik, Sikap dan sumber yang dimiliki kelompok masyarakat, dan Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana.

a. Kondisi sosial ekonomi dan teknologi

Berbagai kondisi sosial, ekonomi dan teknologi dari itu semua merupakan sebagian besar dari hal-hal yang dapat mempengaruhi proses implementasi

kebijakan. Walaupun dengan demikian dari kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi itu merupakan sebuah faktor yang mempengaruhi proses implementasi di luar undang-undang. Hal ini dinyatakan oleh Ibu Widi. Beliau adalah pelaksana Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut :

“Kalau aspek ekonomi masyarakat setempat basisnya adalah petani yang memiliki banyak kriteria misalnya saja ternak, berkebun dan komoditi yang dihasilkan banyak”. (Hasil Wawancara Ibu Widi, 2018).

Berdasarkan yang disampaikan Ketua di bidang perkebunan yang ada diatas masyarakat di Desa Banjaroya secara geografis cocok dalam bidang pertanian dan lain sebagainya. Dengan begitu, dari segi ekonomi masyarakat yang ada di daerah tersebut dapat menghasilkan ekonomi bukan saja dari pengembangan produk unggulan kakao, tapi dalam sektor yang lainnya. Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Bapak Tarmuji Ketua kelompok pertanian Dukuh Banjaran adalah sebagai berikut :

“Kalau merasa ekonomi mendapatkan pendapatan masyarakat, dari segi sosial yaitu untuk tolong menolong, bergotong royong, dan adanya kelompok pertanian pertemuan setiap bulannya, dan dari segi alat Pemerintah sudah memberikan alat seperti alat pangkas ranting”. (Hasil Wawancara Bapak Tarmuji, 2018).

Berdasarkan yang dipaparkan Ketua kelompok pertanian Dukuh Banjaran memang ada kesamaan yang dipaparkan dari staf bidang perkebunan yang ada diatas dalam aspek perekonomian. Tapi disini lain ada yang membedakan dari segi sosial. Memang dalam keadaan ini pada masyarakat sendiri lebih mengerti apa yang terjadi di daerahnya. Ini terbukti bahwa keadaan masyarakat desa sangat membudayakan kebiasaan saling membantu dan perlu dilestarikan. Hal yang

serupa juga diungkapkan oleh Bapak Saryono Ketua kelompok pertanian Dukuh patok wetan adalah sebagai berikut :

“Dari segi ekonomi produk unggulan kakao ini sangat membantu dan apalagi kalau harga kakao mahal pastinya bahagia. Sedangkan kalau dari sosial masyarakat itu sangat rajin membantu satu sama lainnya antar warga. Selanjutnya dalam segi teknologi Pemerintah dan elemen lainnya sudah bersinergi dalam membantu pengembangan produk unggulan”. (Hasil Wawancara Bapak Saryono, 2018).

Berdasarkan yang sudah dipaparkan Ketua kelompok pertanian Dukuh patok wetan terkait dengan kondisi sosial, ekonomi dan teknologi dalam mempengaruhi implementasi program kebijakan suatu bentuk perhatian yang penting. Dalam paparan beliau yang disampaikan merupakan contoh yang baik apalagi keadaan sosial di Desa tersebut sudah menciptakan rasa membantu dalam pengembangan produk unggulan dan sektor yang lainnya. Hanya saja yang bersifat teknologi masih tahap fermentasi dan tahap pengolahan belum beroperasi. Dengan hal ini untuk mewujudkan dari Pemerintah semestinya selalu bertindak cepat demi menciptakan kesejahteraan masyarakat. Adapun berikut alat untuk pengolahan produk unggulan kakao :



Gambar 3.1
Kotak Fermentasi Produk Unggulan Kakao
Sumber : Hasil Dokumentasi diambil pad 14 November 2018



Gambar 3.2
Kotak Fermentasi Produk Unggulan Kakao
Sumber : Hasil Dokumentasi diambil pad 14 November 2018

Dari beberapa gambar yang ada diatas baik gambar 3.1 dan gambar 3.2 mempunyai peranan berbeda dalam melaksanakan atau pengolahan produk unggulan kakao. Untuk gambar 3.1 peranan alat itu sebagai fermentasi dari

produk unggulan kakao yang baru di panen. Sedangkan untuk gambar 3.2 fungsinya sebagai alat pengolahan bubuk kakao. Perlu diketahui bahwasanya alat untuk pengolahan kakao di daerah tersebut belum beroperasi masih pada tahap pembelajaran bagi masyarakat setempat. Sedangkan kotak fermentasi sudah berfungsi sebagai mestinya. Dengan hal ini, mestinya adanya percepatan dalam menggunakan alat pengolahan bubuk tersebut. Demi meningkatkan nilai-nilai ekonomis yang lebih di masyarakat setempat.

b. Dukungan publik

Dukungan publik yang terbentuk dalam proses implementasi program sebenarnya mengalami siklus yang berbeda dalam kondisi waktu. Bentuk dukungan untuk dapat mencapai hasil implementasi kebijakan pada setiap program juga membutuhkan dukungan baik berupa finansial dan material. Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Ibu Widi. Beliau adalah sebagai pelaksana Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut :

“Masyarakat selalu mendukung dengan adanya produk unggulan tersebut, dan Pemerintah selalu memaksimalkan produk unggulan yang ada. Dengan demikian Pemerintah dan masyarakat bersinergi untuk selalu memanfaatkan produk unggulan sendiri dan meningkatkan mutu”. (Hasil Wawancara Ibu Widi, 2018).

Terlihat bentuk dukungan masyarakat dalam pengembangan produk unggulan kakao sangat sinergi. Sebenarnya masyarakat di Desa Banjaroya adalah yang bersifat partisipatif kebijakan Pemerintah yang pro masyarakat. Dengan hal ini dampak yang dihasilkan akan membaik dan peningkatan mutu produk unggulan lebih terjamin. Harapan-harapan didalam mengembangkan produk unggulan memang suatu bentuk dari tujuan Pemerintah, masyarakat dan lembaga

lainnya. Sebagaimana mestinya dengan tujuan yang hendak dicapai tidak terlepas dengan dukungan-dukungan yang nyata baik dalam segi fisik ataupun nonfisik.

c. Sikap dan sumber yang dimiliki kelompok masyarakat

Dalam keadaan atau kondisi yang terjadi pada kelompok sasaran yang ada di masyarakat mengalami dua fenomena dalam mempengaruhi implementasi kebijakan program diantaranya adalah mendukung program atau menentang program. Disamping itu dalam keadaan kelompok sasaran memang terjadi adanya perbedaan baik dalam finansial yang dapat mempengaruhi perubahan perilaku kelompok sasaran maupun dengan adanya kekuatan kelompok masyarakat untuk mempengaruhi keputusan-keputusan badan pelaksana. Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Bapak Kamdianto sebagai staf bidang perkebunan adalah sebagai berikut.

“Masyarakat mempunyai kelas-kelas kelompok yaitu pemula, menengah, dan utama dan dalam penilaian sumber daya dalam kelas-kelas yaitu sertiap setahun sekali. Nah dari itu bisa mengetahui kelas-kelas sumber daya yang dimiliki masyarakat setempat”. (Hasil Wawancara Bapak Kamdianto, 2018).

Kondisi seperti ini yang terjadi yang dipaparkan dari staf bidang perkebunan bahwasanya di Desa Banjaroya terjadi adanya perbedaan kelas sikap dan sumber daya yang dimilikinya. Permasalahan itu terjadi karena perbedaan kelas seharusnya Pemerintah mencanangkan secara cepat dan mensterilkan setiap kelas itu sama dengan pastinya mempunyai kompeten. Sehingga nantinya jika kelas sudah setara atau bagus proses untuk pengembangan produk unggulan lebih mudah. Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Bapak Tarmuji Ketua kelompok pertanian Dukuh Banjaran adalah sebagai berikut :

“Sumber daya yang dimiliki masyarakat adalah bentuk kerukunan yang terjadi dan pastinya saling membantu dalam mengembangkan produk unggulan seperti kakao”. (Hasil Wawancara Bapak Tarmuji, 2018).

Berdasarkan yang telah dipaparkan Ketua kelompok pertanian Dukuh Banjaran sudah sangat membaik dari segi sikap dan sumber daya yang dimiliki pada setiap Desa Banjaroya ini. Dengan ini masyarakat tetap menjaga bentuk budaya tersebut. Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Bapak Saryono. Beliau sebagai Ketua kelompok pertanian Dukuh Patok wetan adalah sebagai berikut :

“Kalau masalah sumber daya yang dimiliki pada masyarakat sebenarnya juga adanya ketergantungan Pemerintah misalnya saja tentang pemberian ilmu atau pengetahuan dari segi pembibitan. Kalau masyarakat tidak diberikan ilmu artinya sumber daya masyarakat juga kurang”. (Hasil Wawancara Bapak Saryono, 2018).

Berdasarkan paparan dari kelompok pertanian Dukuh patok wetan ini dalam kondisi sumber daya merupakan suatu yang pokok atau utama yang dapat dimiliki demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap sumber daya manusia memiliki kegunaan yang lebih untuk lebih menekankan pola pikirnya dan tenaganya dalam mengembangkan produk unggulan kakao. Pengaruhnya sumber daya yang dimiliki terutama pada proses pengembangan produk unggulan masih adanya ketergantungan dari Pemerintah. Misalnya saja dalam proses pengolahan kakao, dengan kondisi masyarakat yang kurang pengetahuan dan bekal tentang itu, diperlukan Pemerintah atau elemen yang lainnya untuk membantu proses pengolah produk unggulan kakao tersebut.

d. Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana

Tentu saja dalam kesepakatan dan kemampuan para pemimpin pejabat pelaksana mampu berpengaruh terhadap hasil yang sudah direncanakan. Para pejabat pelaksana merupakan aktor yang dapat mewujudkan segala prioritas atau tujuan yang telah ditetapkan pada peraturan yang ditetapkan. Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Bapak Kamdianto staf bidang perkebunan adalah sebagai berikut :

“Kalau sekarang ini sikap kepemimpinan yang dibutuhkan pak Bupati adalah seseorang yang mempunyai potensi dan pastinya mempunyai kemampuan yang ada di dalam pengembangan produk-produk yang ada”. (Hasil Wawancara Bapak Kamdianto, 2018).

Berdasarkan paparan yang diatas ternyata di dalam pengembangan produk unggulan Kakao di Desa Banjaroya dibutuhkan sosok pemimpin yang mempunyai kompetensi dalam bidang tertentu. Dan tak kalah pentingnya lagi pemimpin yang bisa mengatur segalanya dan pastinya mempunyai kinerja yang bagus.

Sementara pembahasan dari variabel yang ketiga yaitu variabel-variabel diluar undang-undang yang mempengaruhi implementasi. Adapun indikatornya adalah kondisi sosial ekonomi dan teknologi di Desa Banjaroya, Kecamatan Kalibawang mungkin dalam aspek budaya masyarakat di daerah tersebut adanya budaya gotong royong antar warga. Kalau untuk aspek ekonomi dengan adanya produk unggulan kakao ini mampu untuk menunjang dan menambah nilai tambah pada masyarakat di daerah tersebut.

Dari segi teknologi ini semestinya ada kerja sama pihak yang lainnya bukan dari Pemerintah saja, melainkan dari elemen yang lainnya dalam mengembangkan produk unggulan kakao. Dukungan publik terhadap pengembangan produk unggulan kakao di Desa Banjaroya, Kecamatan Kalibawang ini masyarakat sangat mendukung, dikarenakan program tersebut merupakan salah satu program yang memanfaatkan produk unggulan pada tingkat lokal. Untuk sikap dan sumber daya yang dimiliki kelompok masyarakat sebenarnya selalu didasarkan pada sikap dan peranan Pemerintah dalam mengembangkan produk unggulan kakao.

Desa Banjaroya tersebut memang sangat ketergantungan dari lembaga atau elemen yang lainnya. Selanjutnya untuk kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana disini adalah semestinya seorang pemimpin atau pejabat yang bisa mengatur dan membawa perubahan yang ada terkhusus untuk proses pengembangan produk unggulan kakao. Unsur dalam pejabat dalam pengembangan produk-produk unggulan sangat menentukan hasil yang akan dicapainya. Di samping itu kakao di Desa Banjaroya merupakan sektor pertanian yang banyak ditanam. Maka dari itu pentingnya pemimpin yang bisa mengubah dan mengolah kakao menjadi nilai jual yang lebih tinggi